

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam *Website* Pemerintah Daerah

Implementing Public Information Disclosure in Local Government Websites

Daru Nupikso

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta
Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Imogiri Barat Km 5 Yogyakarta
e-mail : d_nupikso@yahoo.co.id

Naskah diterima: 27-10-2015 , direvisi: 04-12-2015, disetujui: 07-12-2015

Abstrak

Penelitian ini mengambil fokus pada muatan informasi publik dalam *website* pemerintah daerah yang, menurut amanat UU KIP, merupakan “... *informasi yang wajib disediakan dan dipublikasikan secara berkala,*” sekurang-kurangnya ditampilkan melalui *website* resmi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU KIP dalam *website* pemerintah daerah dengan menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kuantitas muatan informasi publik yang ditampilkan dalam *website* pemerintah masih rendah, meskipun beberapa *website* memperoleh poin tinggi dalam beberapa indikator. Terdapat perbedaan signifikan dalam perolehan poin antara *website* yang pernah menerima penghargaan bidang TIK dengan yang belum pernah menerima penghargaan.

Kata Kunci: implementasi UU KIP, informasi publik, *website* pemda.

Abstract

This study focuses on public information content in local government websites which, according to the mandate of the Public Information Disclosure Act, represents type of information that must be provided and published regularly, at least through government official website. This study aims to discover the implementation of the Public Information Disclosure Act in local government websites using content analysis method. The results showed that in general the amount of public information content shared in government websites was still low, although some websites earned high points in several indicators. There was a significant difference in the points obtained by websites that had previously received ICT awards and those that had not.

Keywords: *implementing the Public Information Disclosure Act, public information, local government websites.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari 90 negara yang sudah mempunyai regulasi mengenai Informasi Publik melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Lahirnya UU KIP merupakan langkah untuk mengurangi kesenjangan antara “apa yang diberikan pemerintah” dengan “apa yang diinginkan masyarakat”, atau dengan kata lain upaya pemerintah untuk menjadikan kinerjanya lebih transparan. Dalam konteks yang luas transparansi adalah konsep beragam yang sering digabungkan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atau bahkan pemberantasan korupsi, imparsialitas, dan supremasi hukum (Bauhr, dkk 2012). Dalam lingkup yang terbatas, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Keterbukaan informasi publik belakangan ini menjadi tuntutan global yang disuarakan berbagai pihak. Menurut Sardar (1989) informasi sudah menjadi bagian dari unsur kekuasaan, tanpa informasi orang akan sulit meraih kekuasaan. Hal inilah yang melatarbelakangi dalam pemerintahan yang otoriter dengan orientasi kekuasaan, informasi yang mengalir ke masyarakat sangat dibatasi. Indonesia pernah mengalami masa-masa dimana informasi dikendalikan dan diterima masyarakat sesuai selera pemerintah. Informasi yang mengalir ke masyarakat sudah melewati mekanisme kontrol, sehingga akan selalu menguntungkan pemerintah. Namun, Perkembangan TIK dewasa ini telah mengubah pola kebijakan informasi dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Informasi bukan lagi sesuatu yang dapat disembunyikan atau dikuasai. Dengan memanfaatkan TIK masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi melalui berbagai media.

Salah satu asas dalam UU KIP adalah setiap informasi publik harus dapat diperoleh pemohon dengan cepat, tepat waktu, biaya

ringan, dan cara sederhana. Hal ini mengandung arti bahwa badan publik harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat dapat mengakses informasi publik sesuai dengan asas tersebut. Salah satu pilihan yang banyak dilakukan oleh badan publik di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi, kabupaten/kota adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui jaringan internet dengan memanfaatkan media *website*.

Pemanfaatan *website* di kalangan pemerintahan menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Sampai dengan tahun 2012 indeks web menunjukkan bahwa semakin banyak negara di dunia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi kepada warga negaranya, menyediakan fasilitas transaksi keuangan *online*, melakukan konsultasi dan edukasi kepada warga negara. Menurut Laporan Survei PBB tahun 2012, dari 193 negara anggota PBB, 190 di antaranya atau 98,4% sudah membangun *website* guna menjembatani pelayanan informasi publik (United-Nation, 2012).

Pada skala nasional, pemanfaatan internet juga tumbuh secara signifikan, khususnya pembangunan dan pengembangan *website* yang dikelola pemda. Upaya pemerintah mendorong pemanfaatan TIK di samping melalui kebijakan berupa peraturan perundangan yang sudah ada selama ini, juga dengan menumbuhkan motivasi lewat berbagai penilaian dan pemberian penghargaan bagi pemda/lembaga berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu. Penghargaan yang pernah dan selama ini diberikan antara lain *e-Government award*, yaitu penghargaan yang ditujukan kepada lembaga pemerintah terbaik di Indonesia yang telah mengimplementasi teknologi informasi dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Kemudian ICT Pura yaitu penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan mengukur dimensi *ICT Use (Intensity)*, *ICT Readiness*

(*Infrastructure*), *ICT Capability (Skills)* dan *ICT Impact (Outcomes)*.

Menurut Pusdatinkomtel Kementerian Dalam Negeri, hingga Mei 2013, dari 530 pemda (provinsi, kabupaten dan kota), 491 atau 92,6% di antaranya sudah mempunyai *website* resmi.

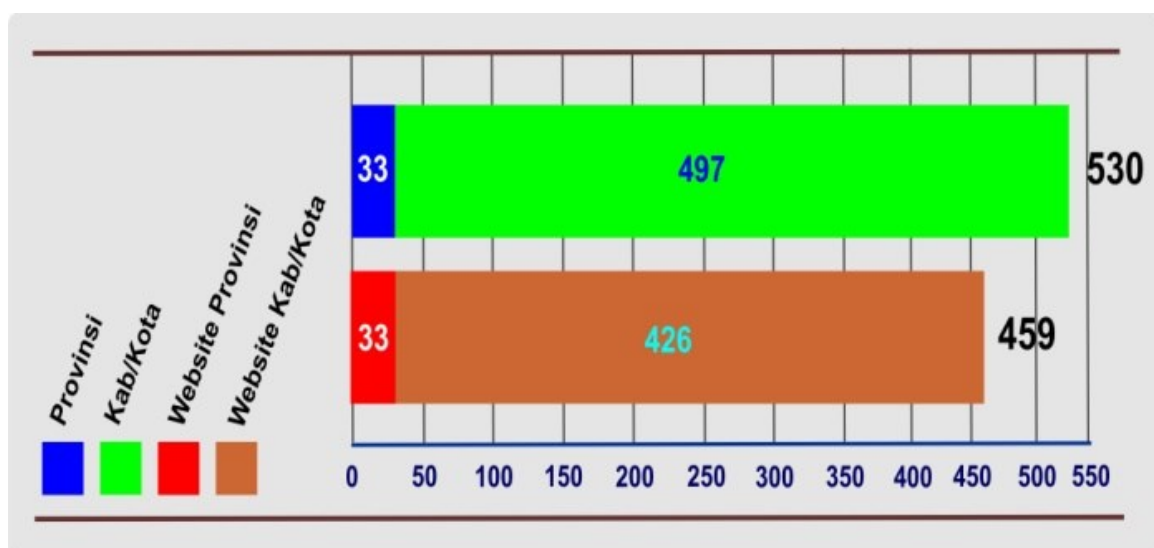
Pemanfaatan media dalam rangka publikasi informasi publik dapat dilakukan melalui berbagai cara dan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang ada. Salah satunya yang diwajibkan bagi badan publik negara adalah memanfaatkan *website* resmi bagi yang telah memiliki. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan jenis informasi publik yang sekurang-kurangnya diumumkan melalui *website* resmi. Penyebarluasan informasi publik dengan memanfaatkan *website* resmi yang dimiliki oleh badan publik negara menjadi fokus penelitian ini.

Membangun *website* yang menyediakan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat menjadi sangat penting. Secara spesifik, jenis informasi yang dibutuhkan dan penting diketahui masyarakat kemungkinan berbeda antardaerah atau antar-negara, tetapi pada tingkat tertentu terdapat kesamaan. Survei yang pernah dilakukan di Amerika kepada warganya tentang jenis

informasi apa yang mereka ingin ketahui, hasilnya menunjukkan bahwa informasi tentang keuangan yang berupa laporan pengelolaan anggaran, informasi proses perumusan kebijakan publik, dan informasi nama-nama pelaku kejahatan seks memperoleh nilai tinggi (Piotrowski & Van Ryzin, 2007).

Terkait dengan penelitian ini, penilaian atas muatan informasi publik di *website* pemerintah dengan melakukan evaluasi terhadap informasi yang ditampilkan *website* pemerintah yang dilakukan Sarda, Navas, & Rius, (2013) menyimpulkan bahwa informasi yang dikeluarkan pemerintah lewat *website* masih kurang. Evaluasi didasarkan pada 41 indikator yang disusun dengan mengacu pada *the Decalogue of Good Practices in Local Public Communication* (undang-undang informasi lokal Spanyol).

Harder dan Jordan (2013) membuktikan bahwa ada hubungan antara demografi dengan penggunaan internet dan kebutuhan akan pelayanan pemerintah lewat IT (*e-governement*). Harder dan Jordan yang mengukur keterbukaan informasi di negara bagian Arkansas pada 35 *website* pemerintah setingkat kabupaten menemukan adanya hubungan positif antara jumlah penduduk dengan skor keterbukaan.



Gambar 1. Jumlah *Website* Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia

Sumber: Pusdatinkomtel Kemendagri (diolah)

Selama ini keberadaan *website* yang dikelola pemda (Pemda) belum secara spesifik diamati muatan informasi publiknya. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2009) bertujuan melihat upaya diseminasi informasi publik yang dilakukan 20 departemen di Indonesia melalui *website* resmi. Analisisnya melalui struktur navigasi dengan alat bantu *signpost* dan *wayfinding*. Dengan menggunakan teori perancangan antarmuka *website*, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya diseminasi informasi publik melalui *website* departemen telah dilakukan dengan sangat baik. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus lebih memberi perhatian pada kemudahan navigasi dan tidak menyentuh pada isi muatan informasi publik *website*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan, bagaimana implementasi UU KIP dalam *website* Pemerintah Daerah (pemda), yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apakah ada perbedaan antara *website* yang dikelola Pemda yang pernah meraih penghargaan dengan yang tidak memperoleh penghargaan? Oleh sebab itu penelitian tentang *website* Pemda perlu dilakukan dengan objek penelitian pada ketersediaan konten informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP. Penelitian ini penting dilakukan dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam membuat kebijakan yang dapat mendorong percepatan implementasi UU KIP melalui *website* Pemda.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengukur keterbukaan informasi publik berdasarkan indikator jenis “Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala” yang muncul di halaman muka (*homepage*) *website* Pemda. Penelitian ini melihat implementasi keterbukaan informasi publik melalui *website* Pemda dengan menggunakan penilaian poin indikator. Penilaian juga dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara *website* Pemda yang pernah mendapatkan

penghargaan dan yang belum pernah memperoleh.

Dalam perspektif teori implementasi, van Meter dan van Horn dalam (Winarno 2014) menggolongkan kebijakan dalam dua karakteristik yang berbeda, yakni jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus yang menyangkut tujuan antara pemeran serta dan proses implementasi. Jumlah perubahan sangat penting mengingat perubahan terkait dengan munculnya konflik dalam proses implementasi. Perubahan inkremental, yang umumnya berupa revisi dari kebijakan terdahulu biasanya mendapat tanggapan positif dibanding perubahan yang drastis dan mendasar. Pada tingkat organisasi, proses implementasi yang tidak mengharuskan reorganisasi secara besar-besaran tidak akan menimbulkan resistensi yang tinggi. Karakteristik yang kedua adalah konsensus, salah satu faktor penting adalah sejauh mana pejabat tingkat bawah selaku impementor berperan serta dalam pembuatan keputusan kebijakan.

Selain dua karakteristik tersebut, James Lester dalam (Purwanto dan Sulistyastuti 2012) memelopori munculnya teori kontingensi dalam proses implementasi. Proposisi teori ini menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu komitmen dan kapasitas pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat *e-Government* untuk dipergunakan sebagai referensi penyusunan kebijakan bidang kominfo dan atau melakukan revisi buku *Panduan Pembuatan Website* Pemda agar sesuai dengan tuntutan UU KIP.

METODE

Menurut Kriyantono (2009), analisis Isi merupakan metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis,

objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Hasil penelitian yang dilakukan McMillan (2000) menyatakan bahwa teknik analisis isi *World Wide Web* stabil dan dapat diterapkan pada lingkungan konten yang dinamis.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi konten web yang diperluas atau *Computer-Mediated Discourse Analysis/ CMDA* (Herring, 2004). Kategorisasi yang dijabarkan dalam lembar koding ditetapkan berdasarkan skema yang sudah ada dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 Pasal 11 (tabel 1). Populasi penelitian adalah seluruh *website* Pemda di Indonesia yang berjumlah 491. Jumlah sampel diambil dengan menggunakan *software Sample Size Calculator* yang diakses melalui <http://www.surveysystem.com/index.htm>.

Perhitungan yang dilakukan dengan populasi sebanyak 491 *website*, *margin of error* ditentukan 10% dan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan jumlah sampel sebanyak 80 *website*.

Penarikan sampel menggunakan teknik *Multifarious Sampling* (Bungin, 2005: 117), yaitu "*Purposive Random Sampling*" yang dilakukan melalui dua tahap. Pengambilan sampel tahap pertama menggunakan teknik *purposive*, yaitu semua *website* Pemda yang penamaannya telah sesuai dengan Permen Kominfo No.28 Tahun 2006 dan pernah mendapat penghargaan di bidang TIK berupa *e-government award* dan *ICT Pura* seluruhnya dipilih sebagai sampel, jumlahnya ada 32 *website*. Kemudian pada tahap kedua, sampel diambil melalui *random* (acak) dengan kerangka sampel adalah populasi seluruh *website* Pemda dikurangi jumlah *website* yang sudah diambil melalui tahap pertama.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan mengakses 80 *website* yang menjadi sampel pada halaman muka (*homepage*) dan diamati secara *online* rata-rata selama 15 hingga 20 menit setiap *website*. Simbol atau lambang yang sesuai dengan kategori yang telah disusun dicatat dalam lembar koding

serta diberi poin. Dalam pengambilan data peneliti yang sekaligus bertindak sebagai koder 1, dibantu oleh fungsional peneliti BPPKI Yogyakarta, sebagai koder 2. Pengamatan dan pencatatan data dilakukan dari tanggal 4 Juni sampai dengan 2 Juli 2014.

Selanjutnya teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Seluruh hasil koding dari 80 *website* ditabulasi untuk melihat jumlah poin yang diperoleh oleh masing-masing *website* pemda serta dilakukan interpretasi dengan membandingkan antara *website* milik pemda yang pernah meraih penghargaan dan yang belum. Interpretasi dilakukan dengan melihat *website* yang memperoleh poin yang menonjol dan kemudian melihat hasil perolehan poin keseluruhan *website* sampel
2. Kemudian setiap indikator untuk masing-masing *website* sampel dianalisis secara deskriptif dengan dasar jumlah poin yang diperoleh masing-masing *website*.

Uji Realibilitas

Sebelum lembar koding yang memuat kategori dan indikator dipergunakan untuk pengambilan data, dilakukan uji reabilitas antarkoder. Berdasarkan uji realibilitas terhadap 8 *website*, hasilnya mencapai 0,9. Sesuai dengan formula Holsti, angka reabilitas yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70% (Eriyanto, 2011). Dengan demikian, koding yang digunakan sangat *reliable*. Rumusnya adalah:

$$\text{Reliabilitas Antar - Coder} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

M : Jumlah coding yang disetujui oleh masing-masing koder

N1: Jumlah coding yang dibuat oleh koder 1

N2: Jumlah coding yang dibuat oleh koder 2

Hasil rekapitulasi uji reabilitas seluruh kategori terdapat pada tabel 1.

Kategorisasi yang dipergunakan dalam penelitian ini mengacu peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 pasal 4 butir e, yaitu jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui *website* resmi. Kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala terdiri dari sepuluh Kategori dengan jumlah indikator sebanyak 30. Setiap informasi yang sesuai dengan indikator diberi poin 1, bila informasi tidak lengkap diberi poin 0,5 dan poin 0 bila tidak ada informasi sama sekali. Poin tertinggi yang dapat diperoleh setiap *website* adalah 30, artinya seluruh indikator dapat ditemukan lengkap pada *website* (Tabel 2).

Menurut Rifee, Lacy dan Fico (1998) dalam Eriyanto (2011), proses koding dalam analisis isi dilakukan dengan melihat isi yang tampak (*manifest*), tetapi dalam tahap analisis

dapat menggunakan dan memasukkan penafsiran dari aspek-aspek yang tidak tampak (*latent*). Seluruh data yang masuk ditabulasi dan diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan olah data menunjukkan bahwa peluang perolehan poin maksimal sebesar 30 tidak dapat dicapai oleh *website* pemerintah daerah. Poin rata-rata (mean) adalah 12,13 (40,43%) dan yang memperoleh poin di atas rata-rata sebanyak 42 *website* (52,5%). Terdapat 6 *website* yang memperoleh poin 20 atau di atasnya, yaitu DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Lampung. Secara lengkap, hasil pengukuran keterbukaan informasi publik

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Reliabilitas Masing-masing Kategori

No	Kategori	Persentase Persetujuan Masing-masing Kategori
1	Profil Badan Publik	100
2	Ringkasan program / kegiatan yang sedang dijalankan	75
3	Informasi kinerja badan public	100
4	Ringkasan laporan keuangan	100
5	Ringkasan akses informasi publik	100
6	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik	75
7	Informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik	86
8	Informasi ttg tata cara pengaduan mengenai penyalahgunaan wewenang	75
9	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	100
10	Informasi ttg prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat	100

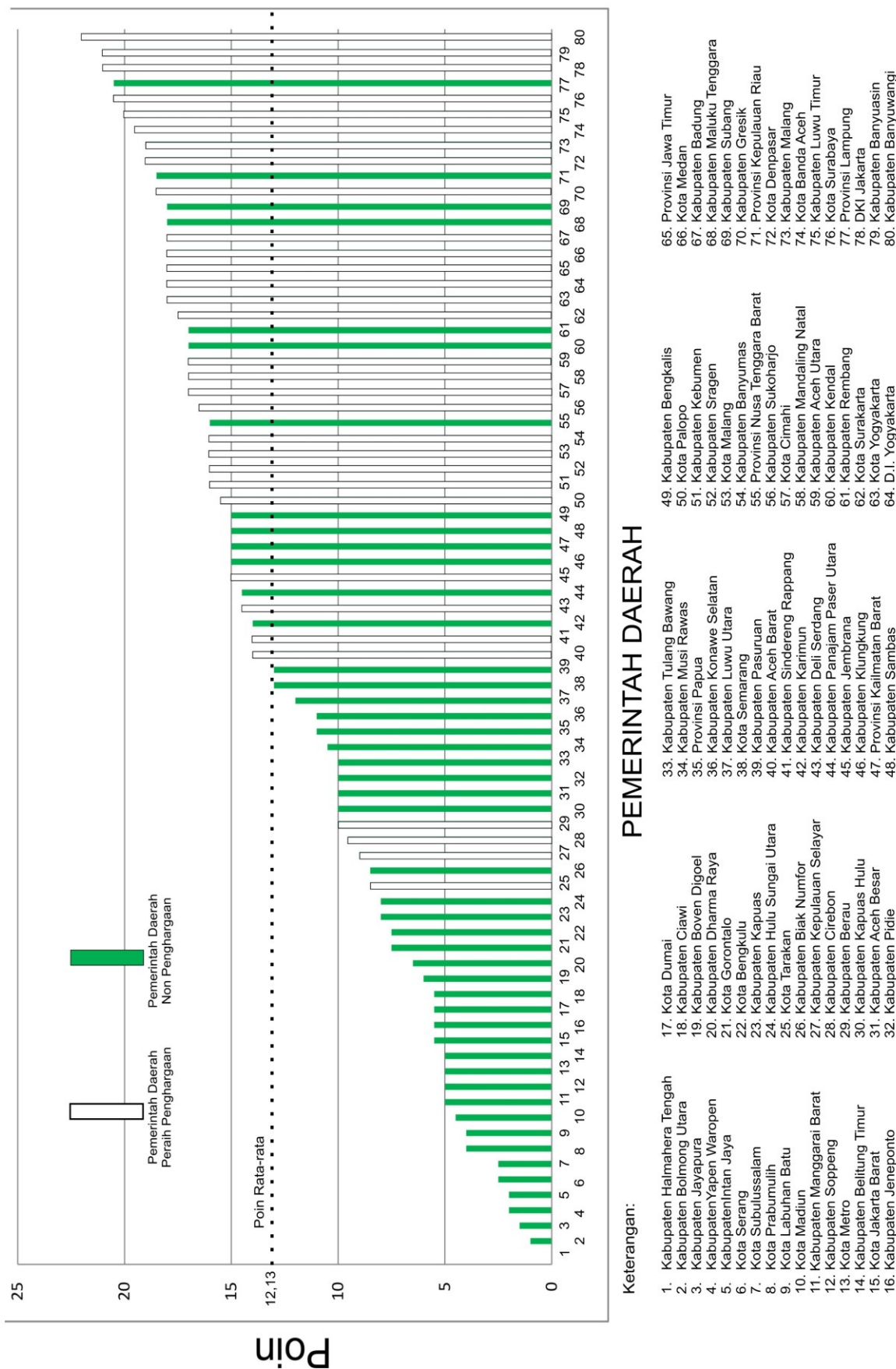
Sumber: Perhitungan Reabilitas

dalam *website* pemerintah daerah yang direpresentasikan melalui perolehan poin ditampilkan dalam gambar 2.

Kolom yang terang (putih) menunjukkan pemda penerima penghargaan yang perolehan poinnya sebagian besar di atas

Tabel 2. Kategori dan Indikator berdasarkan Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala

	Kategori	Indikator	Poin
1	Profil Badan Publik	Informasi tentang kedudukan, domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tugas badan publik beserta unit di bawahnya Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural Laporan Harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik	3
2	Ringkasan program / kegiatan yang sedang dijalankan	Nama program dan Kegiatan Penanggung jawab, pelaksana program/kegiatan serta nomor telepon dan alamat yang dapat dihubungi Target dan/ capaian program kegiatan Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik penyelenggaraan kegiatan pendidikan umum	9
3	Informasi kinerja badan publik	Narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya	1
4	Ringkasan laporan keuangan	Rencana dan laporan realisasi anggaran Neraca Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi Daftar aset dan investasi	4
5	Ringkasan akses informasi publik	Jumlah pemohon informasi publik yang diterima Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak. Alasan penolakan permohonan informasi publik	4
6	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	2
7	Informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik	Tata cara memperoleh informasi publik Tata cara pengajuan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik Penanggung jawab yang dapat dihubungi	3
8	Informasi ttg tata cara pengaduan mengenai penyalahgunaan wewenang	Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang dilakukan pejabat Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan izin atau melakukan perjanjian kerja dengan badan publik	2
9	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	1
10	Informasi ttg prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat	Informasi ttg prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat	1
Jumlah poin indikator			30



Gambar 2. Perolehan Poin Keseluruhan Indikator

Tabel 3. Hasil Poin Indikator KIP Website Pemda disusun dari Terkecil hingga Terbesar

Nomor	Kategori	Profil Badan Publik	Ringkasan Program/Kegiatan	Informasi Kinerja BP	Ringkasan Laporan Keuangan	Ringkasan Akses Informasi	Informasi ttg Peratrn & kebijakan	Informasi ttg tatacara memperoleh Inf, Publik	Informasi ttg pengaduan penyalahgunaan wewenang	Informasi ttg Pengumuman pengaduan Brg & jasa	Informasi ttg peringatan dini	TOTAL POIN
	Website Pem da											
poin maksimal		3	9	1	4	4	2	3	2	1	1	30
1	Kab Halmahera Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kab Bolmong Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Kab Jayapura, Papua	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,5
4	Kab Yapen Waropen	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Kab Intan Jaya	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
6	Kota Serang	1,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,5
7	Kota Subulussalam	0	2	0	0	0	0	0	0	0,5	0	2,5
8	Kota Prabumulih	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
9	Kab Labuhan Batu Slt	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
10	Kota Madiun	1,5	0	0	0	0	2	0	0	1	0	4,5
11	Kab Manggarai Barat	1,5	2,5	0	0	0	0	0	0	1	0	5
12	Kab Soppeng	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	5
13	Kota Metro	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5
14	Kab Belitung Timur	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5
15	Kota Jakarta Barat	2	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5
16	Kab Jeneponto	1	1	0	2	0	0,5	0	0	1	0	5,5
17	Kota Dumai	2	2,5	0	0	0	0	0	0	1	0	5,5
18	Kab Ciamis	2	0	0,5	0	2	0	0	0	1	0	5,5
19	Kab Bovendigoel	2	0,5	0,5	0	0	0	0	2	1	0	6
20	Kab Dharma Raya	2	1,5	0	0	0	2	0	0	1	0	6,5
21	Kota Gorontalo	2	1,5	0	3	0	0	0	0	1	0	7,5
22	Kota Bengkulu	2	2,5	0	0	0	2	0	0	1	0	7,5
23	Kab Kapuas	2	2	0	0,5	0	0,5	0	2	1	0	8
24	Kab Hulu Sungai Utara	2	4	0	0	0	1	0	0	1	0	8
25	Kota, Tarakan	1,5	4	0	0	0	0	0	2	1	0	8,5
26	Kab Blak Num for	2	4,5	0	0	0	0	0	2	0	0	8,5
27	Kab, Kepulauan Selayar	2	2	0,5	1,5	0	2	0	0	1	0	9
28	Kab, Cirebon	2	1,5	1	2	0	2	0	0	1	0	9,5
29	Kab. Berau	2	5,5	0	0,5	0	1	0	0	1	0	10
30	Kab Kapuas Hulu	2	4	0	0	0	1	0	2	1	0	10
31	Kab Aceh Besar	2	3,5	0,5	1	0	2	0	0	1	0	10
32	Kab Pidie	2	5	0,5	0,5	0	2	0	0	0	0	10
33	Kab Tulang Bawang	2	5	0,5	1,5	0	0	0	0	1	0	10
34	Kab Musi Rawas	2	5,5	0,5	0,5	0	1	0	0	1	0	10,5
35	Prov Papua	2	4	0	1	0	1	0	2	1	0	11
36	Kab Konawe Selatan	2	3	0	3	0	1	0	2	0	0	11
37	Kab Luwu Utara	2	6	1	0	0	2	0	0	1	0	12
38	Kota Semarang	2	8	0	0	0	2	0	0	1	0	13
39	Kab Pasuruan	2	6	1	1	0	2	0	0	1	0	13
40	Kab, Aceh Barat	2	7	0,5	1,5	0	2	0	0	1	0	14
41	Kab, Sindereng Rappang	2	7,5	0,5	1	0	2	0	0	1	0	14
42	Kab Karimun	2	7	1	1	0	2	0	0	1	0	14
43	Kab, Deli Serdang	2	8	1	1,5	0	1	0	0	1	0	14,5
44	Kab Panajam Paser Utr	2	7	0,5	3	0	1	0	0	1	0	14,5
45	Kab, Jembrana	2	8	1	1	0	2	0	0	1	0	15
46	Kab, Klungkung	2	6	0	3	0	1	0	2	1	0	15
47	Prov Kalimantan Barat	2	5	0	3	0	1	0	2	1	1	15
48	Kab Sambas	2	6	0	3	0	1	0	2	1	0	15
49	Kab Bangkalan	2	7	0	0	0	2	3	0	1	0	15
50	Kota Palopo	2	6,5	1	3	0	2	0	0	1	0	15,5
51	Kab, Kebumen	2	8	1	2	0	2	0	0	1	0	16
52	Kab, Sragen	2	7	1	2	0	2	1	0	1	0	16
53	Kota Malang	2	7	1	1	0	2	3	0	0	0	16
54	Kab, Banyumas	2	8	1	2	0	2	0	0	1	0	16
55	Prov Nusa Tenggara, Barat	2	7	0	0	0	1	3	2	1	0	16
56	Kab, Sukoharjo	2	9	0,5	1,5	0	2	0	0	1	0,5	16,5
57	Kota Cimahi	2	8	1	3	0	2	0	0	1	0	17
58	Kab, Mandailing Natal	2	8	1	3	0	2	0	0	1	0	17
59	Kab, Aceh Utara	2	8	1	3	0	2	0	0	1	0	17
60	Kab Kendal	2	6	1	2	0	2	3	0	1	0	17
61	Kab Rembang	2	7	1	2,5	0	0,5	3	0	1	0	17
62	Kota Surakarta	2	9	1	2	0,5	2	0	0	1	0	17,5
63	Kota Yogyakarta	2	7	1	4	0	2	0	1	1	0	18
64	D.I, Yogyakarta	2	9	1	2	0	2	0	1	1	0	18
65	Prov, Jawa Timur	2	8	1	2	0	2	2	0	1	0	18
66	Kota Medan	2	8	1	3	0	2	0	0	1	1	18
67	Kab, Badung	2	8	1	3	0	2	0	0	1	1	18
68	Kab Maluku Tenggara	2	8	1	3	0	1	0	2	1	0	18
69	Kab Subang	2	8,5	0,5	1	0	2	3	0	1	0	18
70	Kab, Gresik	2	8,5	1	4	0	2	0	0	1	0	18,5
71	Prov Kepulauan Riau	2	9	0,5	4	0	2	0	0	1	0	18,5
72	Kota Denpasar	2	9	1	3	0	2	0	1	1	0	19
73	Kab. Malang	2	9	1	4	0	2	0	0	1	0	19
74	Kota Banda Aceh	2	8,5	1	2	0	2	3	0	1	0	19,5
76	Kab, Luwu Timur	2	8	1	3	0	2	3	0	1	0	20
77	Kota Surabaya	2	8,5	1	3	0	2	3	0	1	0	20,5
78	Prov Lampung	2	8	0,5	4	0	2	3	0	1	0	20,5
75	DKI Jakarta	2	8	1	3	0	2	2	1	1	1	21
79	Kab, Banyuasin	2	7	1	2	3	2	3	0	1	0	21
80	Kab. Banyuwangi	2	9	1	4	0	2	3	0	1	0	22
Jumlah Total		146,5	41,5	39	11,9	5,5	100,5	41	28	72,5	4,5	971,5
Rata-rata		1,83	5,19	0,49	1,49	0,07	1,26	0,51	0,35	0,91	0,06	12,14

Sumber: Data primer diolah

rata-rata. Hanya 4 pemerintah daerah peraih penghargaan yang memperoleh poin di bawah rata-rata, yaitu *website* Kota Tarakan, Kabupaten Kepulauan Selayar, Cirebon dan Berau. Hasil perolehan poin berdasarkan 10 kategori diuraikan sebagai berikut.

Informasi mengenai Profil Badan Publik ditampilkan oleh 96,25% *website* meskipun tidak secara lengkap. Adapun poin tinggi lainnya adalah Ringkasan Program dan Kegiatan yang ditampilkan oleh 82,5%.

Sebanyak 77 *website* (96,25%) menampilkan 2 indikator (dari 3) pada kategori profil badan publik yang antara lain memuat indikator profil pejabat pemda, organisasi dan nama-nama satuan kerja pemda (SKPD), visi dan misi, sejarah dan letak geografis.

Pada bagian lain, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa menunjukkan frekuensi yang tinggi (90%). Pengadaan barang dan jasa merupakan program nasional dari lembaga yang menye-

enggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang *link*-nya ditempatkan menjadi subdomain pada sebagian besar *website* pemda.

Secara lengkap hasil perolehan poin keseluruhan *website* yang menjadi sampel dapat dilihat dalam tabel 3.

Informasi tentang keberadaan dan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dan yang terkait dengan hal tersebut sangat rendah di *website* pemda. Sebanyak 77 *website* (96,25%) tidak menampilkan informasi tentang ringkasan akses Informasi Publik, kemudian 66 (82,5%) tidak menampilkan tata cara memperoleh informasi publik. Selanjutnya lebih dari separuh, atau 43 *website* menampilkan dan memberi akses untuk mengunduh produk peraturan perundang-undangan, baik berbentuk Perda dan peraturan walikota/bupati. Namun sebaliknya, informasi tentang peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat sangat rendah. Hanya 4 *website* yang mem-

Tabel 4. Sebaran Frekuensi Berdasarkan Indikator KIP

Indikator	Frekuensi					
	Lengkap	%	Sebagian	%	Tidak Ada	%
Profil Badan Publik	0	(0)	77	(96,25)	3	(3,75)
Ringkasan program / kegiatan yang sedang dijalankan	7	(8,75)	66	(82,5)	7	(8,75)
Informasi kinerja badan publik	32	(40)	15	(18,75)	33	(41,25)
Ringkasan laporan keuangan	6	(7,5)	47	(58,75)	27	(33,75)
Ringkasan akses informasi publik	0	(0)	3	(3,75)	77	(96,25)
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik	43	(53,75)	16	(20)	21	(26,25)
Informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik	11	(13,75)	3	(3,75)	66	(82,5)
Informasi ttg tata cara pengaduan mengenai penyalahgunaan wewenang	3	(3,75)	12	(15)	65	(81,25)
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	72	(90)	1	(1,25)	7	(8,75)
Informasi ttg prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat	4	(5)	1	(1,25)	75	(93,75)
Jumlah	178		241		381	
%	22,25		30,12		47,63	

Sumber: Data primer diolah

punya informasi lengkap, yaitu *website* Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Badung, Kota Medan dan DKI Jakarta. Kemudian hanya satu yang informasinya sebagian, sisanya atau 75 *website* tidak mempunyai informasi tersebut.

Informasi mengenai laporan keuangan secara lengkap hanya di posting oleh 6 *website*, yaitu: Kota Yogyakarta, Kabupaten Gresik, Banyuwangi, Malang, Provinsi Kepulauan Riau dan Lampung.

atau tidak lengkap. Sebaran frekuensi berdasarkan indikator KIP secara lengkap terdapat pada tabel 4.

Tabel 5 menunjukkan perbandingan perolehan poin antara *website* yang pernah memperoleh penghargaan dan yang belum. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kedua kelompok sampel tersebut berikut dilakukan uji beda menggunakan program SPSS dengan menyusun hipotesis sebagai berikut:

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 penghargaan	16.5156	32	3.41601	.60387
nonpenghargaan	7.0313	32	4.97403	.87929

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 penghargaan & nonpenghargaan	32	.196	.282

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 penghargaan - nonpenghargaan	9.48438	5.45433	.96420	7.51788	11.45087	9.837	31	.000

Selanjutnya, dari 10 kategori dengan jumlah sampel 80, frekuensi pada kolom lengkap seharusnya berjumlah 800, tetapi hasil sebaran frekuensi menunjukkan hanya 178 atau 22,25% yang lengkap, sebagian besar atau 47,63% tidak ada dan sebagian 30,12%

Ho : tidak ada perbedaan antara *website* kota/kab yang meraih penghargaan dengan yang tidak meraih penghargaan.

H1 : ada perbedaan antara *website* kota/kab yang meraih penghargaan dengan yang tidak meraih penghargaan.

Tabel 5. Perbandingan Hasil Poin Indikator KIP antara *Website* Peraih penghargaan dengan Non-Penghargaan

Peraih Penghargaan	Poin	Poin	Non-Penghargaan
Kab. Cirebon	9,5	2,5	Kota Serang
Kab. Kebumen	16	4,5	Kota Madiun
Kab. Sragen	16	5,5	Kota Jakarta Barat
Kota Malang	16	5,5	Kab Ciamis
Kab. Banyumas	16	13	Kota Semarang
Kab. Sukoharjo	16,5	13	Kab Pasuruan
Kota Cimahi	17	14	Kab Karimun
Kota Surakarta	17,5	15	Kab Bangkalan
Kota Yogyakarta	18	17	Kab Kendal
D.I. Yogyakarta	18	17	Kab Rembang
Prov. Jawa Timur	18	18	Kab Subang
Kab. Gresik	18,5	0	Kab Halmahera Tengah
Kab. Malang	19	1	Kab Bolmong Utara
DKI Jakarta	20	1,5	Kab Jayapura, Papua
Kota Surabaya	20,5	2	Kab Yapen Waropen
Kab. Banyuwangi	22	2	Kab Intan Jaya
Kota. Tarakan	8,5	2,5	Kota Subulussalam
Kab. Kepulauan Selayar	9	4	Kota Prabumulih
Kab. Berau	10	4	Kab Labuhan Batu Slt
Kab. Aceh Barat	14	5	Kab Manggarai Barat
Kab. Sindereng Rappang	14	5	Kab Soppeng
Kab. Deli Serdang	14,5	5	Kota Metro
Kab. Jembrana	15	5	Kab Belitung Timur
Kota Palopo	15,5	5,5	Kab Jeneponto
Kab. Mandailing Natal	17	5,5	Kota Dumai
Kab. Aceh Utara	17	6	Kab Bovendigoel
Kota Medan	18	6,5	Kab Dharma Raya
Kab. Badung	18	7,5	Kota Gorontalo
Kota Denpasar	19	7,5	Kota Bengkulu
Kota Banda Aceh	19,5	8	Kab Kapuas
Kab. Luwu Timur	20	8	Kab Hulu Sungai Utara
Kab. Banyuasin	21	8,5	Kab Biak Numfor
		10	Kab Kapuas Hulu
		10	Kab Aceh Besar
		10	Kab Pidie
		10	Kab Tulang Bawang
		10,5	Kab Musi Rawas
		11	Prov Papua
		11	Kab Konawe Selatan
		12	Kab Luwu Utara
		14,5	Kab Panajam Paser Utara
		15	Kab, Klungkung
		15	Prov Kalimantan Barat
		15	Kab Sambas
		16	Prov Nusa Tenggara Barat
		18	Kab Maluku Tenggara
		18,5	Prov Kepulauan Riau
		20,5	Prov Lampung

Hasil analisis dengan t-test, diperoleh taraf (nilai) sig. F adalah 0,00 dengan nilai t 9,837 atau nilai signifikansi di bawah 5% (0,05) yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, ada perbedaan antara website kota/kab. yang meraih penghargaan

dengan *website* kota/kab yang tidak meraih penghargaan. Artinya, perolehan poin *website* pemerintah pemda dipengaruhi oleh prestasi pemerintah daerah dalam wujud penghargaan yang mereka terima.

Poin tinggi yang umumnya diperoleh *website* meraih penghargaan tentu bukan suatu kebetulan, ada relevansi antara muatan *website* yang lengkap dan komitmen dari para pengelolanya. Pemda yang pernah meraih penghargaan diasumsikan telah menjalankan manajemen pengelolaan *website* dengan komitmen yang lebih baik.

Survey *e-government* yang dilakukan PBB pada tahun 2014 menemukan fakta bahwa pemanfaatan TIK untuk mendukung pemerintahan banyak diimplementasikan oleh negara-negara maju dengan pendapatan nasional yang tinggi. Meskipun hal tersebut bukan menjadi jaminan, karena tidak sedikit negara dengan pendapatan nasional yang relatif rendah tetapi secara signifikan mampu mengimplementasikan *e-government* dengan baik. Faktor pendapatan nasional penting, tapi menurut survey tersebut dukungan politik dan kepemimpinan jauh lebih penting, atau dalam arti lain komitmen menjadi dasar kuat untuk implementasi *e-government* yang sukses.

Secara umum muatan informasi publik yang terdapat pada seluruh *website* hasilnya rendah, tetapi beberapa *website* mempunyai keunggulan dibanding dengan yang lain. *Website* Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Lampung merupakan dua *website* yang mempunyai poin tinggi, bahkan *website* Provinsi Kepulauan Riau memperoleh poin maksimal untuk kategori informasi tentang ringkasan program dan kegiatan. Artinya untuk informasi tentang kegiatan dan program yang sedang dijalankan, Pemerintah Kepulauan Riau sudah sangat terbuka.

Informasi Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Publik (BP) yang berjumlah 9 indikator juga tidak dapat terpenuhi oleh

semua *website*. Kategori ini menuntut penjabaran program dan kegiatan yang rinci, sehingga bagi pemda cukup menyulitkan. Informasi Kinerja BP yang berbentuk narasi cukup baik karena 40% *website* menampilkan kinerja dalam bentuk tayangan video yang menarik.

Profil Badan Publik antara lain berisi informasi kelembagaan, profil pejabat, visi misi, letak geografis, dan informasi dasar suatu daerah lainnya merupakan informasi yang mendominasi dan selalu ada pada *website* resmi pemda. Dilihat dari ketersediaan data, materi profil badan publik relatif mudah didapat, mengingat sumbernya berada di lingkungan pemda. Namun, untuk kategori ini belum semua *website* dapat menampilkan secara lengkap, karena tidak satupun *website* yang menampilkan laporan kekayaan pejabat.

Keterbukaan tentang anggaran dan penggunaannya merupakan salah satu indikator penting, bahkan menjadi unsur utama untuk menilai keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Keterbukaan dalam perilaku pemerintah tercermin dalam struktur dan fungsi sektor publik, terutama dalam proses anggaran, perlakuan pajak, operasional pembiayaan, dan mekanisme pengelolaannya (Kopits dan Craig 1998). Dilihat dari komposisinya, sebagian besar (63,75%) *website* telah memuat laporan keuangan, 6% *posting* secara lengkap dan hanya 28,75% yang sama sekali tidak ada. Hasil tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran pemda sudah cukup terbuka dan banyak kalangan percaya bahwa transparansi bidang anggaran merupakan kunci penting untuk meminimalisasi praktik korupsi di pemerintahan. Gambaran *posting* laporan keuangan *website* ditunjukkan dalam tabel 6.

Tabel 6. Informasi Keuangan Melalui *Website* Pemda

Informasi Keuangan	F	%
Lengkap	6	7,50
Sebagian	51	63,75
Tidak ada	23	28,75
Jumlah	80	100,00

Sumber: Data Primer diolah

Poin maksimal untuk kategori informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik diperoleh *website* Kota Surabaya, Kabupaten Banyuasin, Banyuwangi, Luwu Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Kendal, dan Subang. Hal ini mengindikasikan tujuh pemda tersebut telah mengimplementasikan UU KIP lebih baik dibanding daerah lain.

Informasi tentang tata cara pengaduan mengenai penyalahgunaan wewenang menunjukkan hasil yang sangat rendah. Hanya 3,75% *website* yang mengakomodir fasilitas ini, 15% mengakomodir sebagian dan mayoritas (81,25%) fasilitas ini tidak ada atau tidak dikelola dengan baik. Sebenarnya fasilitas ini dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menjalin komunikasi dengan masyarakatnya, dan menjadi sarana untuk mengakomodasi partisipasi warga dalam bentuk pesan, kritik, ide yang disampaikan, terutama masukan terkait kebijakan yang akan diambil pemda.

Informasi tentang peringatan dini dan tata cara evakuasi dalam keadaan darurat juga sangat minim. Hal ini menyiratkan bahwa kepedulian pemda terhadap informasi ini masih rendah. Informasi ini pada hakekatnya tidak hanya ditujukan pada kondisi darurat seperti bencana alam misalnya gempa bumi, gunung meletus, atau tanah longsor, tetapi juga kondisi bencana seperti kebakaran, banjir dan lainnya. Kondisi darurat seperti ini tentunya dapat dialami oleh seluruh daerah, meskipun selama ini pemetaan daerah bencana hanya fokus pada daerah tertentu yang sering mengalami bencana alam.

Transparansi pengelolaan keuangan secara universal dinilai sebagai informasi yang penting untuk diposting, kemudian tersedianya saluran bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan memberi masukan terkait perumusan kebijakan publik. Proses perumusan kebijakan publik yang mengacu pada kebutuhan masyarakat akan meminimalisir munculnya resistensi kebijakan yang dibuat.

Sebagai sebuah media informasi resmi, *website* pemerintah idealnya mempunyai menu yang standar, meski tidak harus berarti

seragam. Hal ini untuk memudahkan masyarakat mengakses dan mencari informasi yang dibutuhkan. Karena tidak sedikit *website* dengan tampilan menarik secara grafis, tetapi konten dan navigasi yang dibangun tidak memudahkan bahkan membingungkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebenarnya sudah pernah mengeluarkan panduan untuk pembuatan *website* pemda, tetapi selama ini belum ada informasi jelas apakah panduan tersebut menjadi acuan bagi pemda dalam membangun *website*.

PENUTUP

Berdasarkan paparan data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat implementasi UU KIP yang indikator lengkapnya dituangkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 /2010 Pasal 11 dalam *website* Pemda masih tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2011) dan Prabowo,dkk. (2012) yang menyimpulkan bahwa pemahaman dan implementasi UU KIP di Badan publik Pemerintah Daerah masih kurang. Pembentukan PPID selaku pelaksana UU KIP di tingkat pemerintah daerah belum terlaksana secara merata dan PPID yang sudah terbentuk tidak berjalan efektif. Dengan demikian, secara keseluruhan tingkat implementasi UU KIP dalam *website* Pemda masih jauh dari harapan mengingat UU tersebut sudah mulai berlaku efektif sejak 30 April 2010.

Beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian adalah perolehan poin maksimal pada beberapa indikator tertentu oleh beberapa *website*. Kota Surabaya, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Subang yang memuat informasi lengkap tentang tatacara mendapatkan informasi publik. Kemudian Kota Yogyakarta, Kabupaten Gresik, Banyuwangi, Malang, Provinsi Kepulauan Riau

dan Lampung untuk informasi lengkap mengenai pengelolaan keuangan.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara *website* Pemda yang pernah meraih penghargaan *e-government award* dan ICT Pura dan yang belum pernah mendapat penghargaan. Dari 32 *website* meraih penghargaan, 29 *website* memperoleh poin di atas rata-rata. Adapun *website* yang non-penghargaan sebagian besar mendapat poin di bawah rata-rata. Hal ini berarti program penyelenggaraan penghargaan bidang TIK sudah berlangsung dengan baik, dalam arti penilaiannya obyektif.

Website dengan perolehan poin tinggi dan pernah meraih penghargaan tidak identik dengan pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya besar. Terdapat pemerintah daerah yang mempunyai PAD rendah, seperti Kabupaten kepulauan selayar (18,795 juta), Kabupaten Mandailing Natal (25,000 juta) dan Kabupaten Banyuasin (28,376 juta) tetapi mampu mengelola dan memanfaatkan TIK secara lebih baik dibanding pemerintah daerah yang mempunyai PAD lebih besar. Pada konteks ini komitmen atau kemauan politik masing-masing daerah akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi TIK.

Selanjutnya guna mendorong implementasi UU KIP di *website* Pemda, proses penilaian penghargaan TIK perlu memasukkan kriteria tentang UU KIP. Bagi Direktorat *e-Government* Kementerian Kominfo perlu segera melakukan revisi dan atau menyusun aturan atau panduan Pembuatan *Website* Pemda dengan memasukkan kewajiban untuk mengimplementasikan UU KIP.

DAFTAR PUSAKA

- Akbar, Syarifuddin, "Kesiapan Badan Publik di Era Keterbukaan Informasi Publik", Jurnal Pekommas, Vol. 14 Nomor 3 Desember 2011:239-252. BBPPKI Makassar.
- Bauhr, Monika, dan Marcia Grimes. QoG Working Paper Series. 16 Desember 2012. <http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1418/1>

- 418047_2012_16_bauhr_grimes.pdf (diakses Maret 20, 2014).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- DepKominfo. *Panduan Pembangunan Situs Web Pemda*. Jakarta: Depkominfo, 2010.
- Eriyanto. *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Firdaus, Afriyan. *Analisis Struktur Navigasi Website Departemen Negara RI untuk Meningkatkan Diseminasi Informasi Publik*. Bali: Makalah Konferensi Nasional Sistem dan Informatika, 2009.
- Harder, Carolyn, dan Meagan Jordan. "The Transparency of County Website: A Content Analysis." *Public Administration Quarterly*, 2013: 103-128.
- Herring, S.C. "Computer-mediated discourse analysis: An approach to research online behavior." Dalam *Designing for virtual communities in the service of learning*, oleh R. Kling & J.H. Gray (Eds) Barab, 338-376. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Kopits, George, dan Jon Craig. *Transparency in Government Operation*. Washington DC: International Monetary Fund, 1998.
- McMillan, S J. "The Microscope and The Moving Target: The Challenge of Applying Content Analysis to The World Wide Web." *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 2000: 80-98.
- Piotrowski, S J, dan G G Van Ryzin. "Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government." *The American Review of Public Administration*, 2007: 306-323.
- Prabowo Agus, Budiyo, Ansor, Nupikso Daru, Suwarta, "Kompetensi Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi dalam Implementasi UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah" Laporan Penelitian 2012. BPPKI Yogyakarta.
- Sarda, A Moreno, Molina Rodrigues Navas, dan M Corcoy Rius. "The Informasi Published by Local Government, The Website of Catalonia's Municipal government." *Revista Latina de Comuniation Social*, 2013: 502 - 528.
- United-Nation. *E-Government Survey 2012*. New York: United Nations, 2012.

- _____ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- _____ Peraturan Menteri Kominfo No.28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah
- _____ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- _____ *Panduan Pembangunan Situs Web Pemda* (2010).. Jakarta: Depkominfo.
- _____ “Alamat Situs Pemerintahan Daerah Dan LPSE Seluruh Indonesia”, <http://www.kemendagri.go.id/basis-data/2013/05/06/alamat-situs-daerah-dan-lpse>, (diakses 6 September 2014)
- _____ <http://www.surveysystem.com/index.htm> ., Sample Size Calculator